

PENANGANAN BENCANA ALAM DALAM WACANA PEMBANGUNAN ASEAN COMMUNITY 2015

Anik Yuniarti

Abstrak

Masalah bencana alam merupakan tantangan global yang mendapatkan perhatian khusus dari para Pemimpin ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk lebih mengintensifkan kerjasamanya dalam penanggulangan bencana alam. Masalah ini merupakan tantangan dalam mewujudkan ASEAN Community, untuk kini dan masa yang akan datang.

Dibalik musibah bencana alam terdapat berkah yang diterima oleh negara-negara ASEAN. Penanganan bencana alam ini dapat dijadikan momentum upaya pembangunan ASEAN Community. Penanganan bencana alam merupakan perwujudan ASEAN yang lebih berorientasi kepada masyarakat (*people oriented*). Hal ini akan sangat penting dalam upaya untuk menumbuhkan semangat dan perasaan kekitaan (*we feeling*). Dua hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi (*caring and sharing society*). Semua ini sangat mendukung tercapainya Komunitas ASEAN 2015.

Tulisan ini akan membahas kerjasama penanganan bencana alam di ASEAN dan bagaimana hal ini dilihat dalam wacana pembangunan Komunitas Asean tahun 2015.

PENDAHULUAN

Salah satu isu keamanan non tradisional yang menjadi topik pembicaraan penting di ASEAN adalah isu mengenai bencana alam. Isu bencana ini telah menjadi fokus isu yang dibicarakan dari mulai pertemuan tingkat pejabat tinggi, tingkat menteri sampai KTT Asean. Isu bencana menjadi topik yang diangkat terkait dengan upaya penanganannya dari mulai kesiapsiagaan, tanggap darurat sampai pemulihan bencana. Para pejabat tinggi ASEAN dan forum pertemuannya mencoba mencari solusi atas masalah bencana yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Berdasarkan wawasan topik-topik dalam agenda organisasi-organisasasi pemerintahan utama di wilayah ASEAN dan mekanisme dialog dari tahun 2000, nampak bahwa kerjasama transnasional di wilayah ini meluas ke bidang-bidang non tradisional, dan salah satunya berfokus pada kerjasama penanggulangan bencana alam.

Bangsa Indonesia menutup tahun 2004 dalam suasana duka akibat gempa bumi dan tsunami di Aceh pada hari Minggu pagi 26 Desember 2004. Bencana itu tidak hanya

memporak-porandakan manusia di ujung Barat Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain di Tepian Samudera Hindia. Tsunami ini telah mengorbankan lebih dari 300.000 jiwa di sepanjang pantai. Negara-negara yang terkena dampak tsunami ini adalah Indonesia, India, Thailand dan Srilanka. Korban meninggal atau hilang dari Indonesia diperkirakan ada 160.000 jiwa.

Masalah bencana alam merupakan suatu tantangan global yang mendapatkan perhatian khusus dari para Pemimpin ASEAN. Menanggapi fenomena bencana alam para pemimpin ASEAN sepakat untuk lebih mengintensifkan kerjasamanya dalam menanggulangi berbagai permasalahan di bidang bencana, baik yang terjadi di tingkat nasional, regional maupun global.

Terkait dengan perkembangan ASEAN yang telah bertransformasi dari sebuah asosiasi menjadi sebuah komunitas dalam wujud ASEAN Community, maka masalah bencana alam yang terjadi di beberapa negara ASEAN merupakan tantangan dalam perwujudan ASEAN Community, untuk kini dan masa yang akan datang. Tantangan ini tentunya membutuhkan tanggapan tepat dan cepat dari para pemimpin ASEAN.

Tulisan ini akan membahas kerjasama penanganan bencana alam di ASEAN dan bagaimana hal ini dilihat dalam wacana pembangunan Komunitas Asean tahun 2015.

KERJASAMA PENANGANAN BENCANA ALAM ASEAN

Kerjasama penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN sebenarnya sudah terbangun lebih dari tiga puluh tahun lamanya. Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang menandai berdirinya ASEAN merupakan landasan bagi negara anggotanya untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana.

Komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk saling membantu pada saat terjadi bencana antara lain dimuat dalam Declaration of ASEAN Concord yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa : *“natural disasters and other major calamities can retard the pace of development of member states, therefore they shall extend, within their capabilities, assistance for relief of*

member states in distress.” (Asean Selayang Pandang). Para pemimpin ASEAN ketika itu sepakat untuk menjadikan isu penanganan bencana sebagai salah satu bagian penting dari tujuan kerjasama ASEAN.

Babak baru dalam kerjasama di bidang penanganan bencana dimulai ketika mekanisme pengelolaan kerjasamanya ditingkatkan dari tingkat kelompok ahli menjadi komite penuh ASEAN pada tingkat pejabat senior. *The Declaration of ASEAN Concord II*, yang ditandatangani di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003, mempertegas kembali tentang pentingnya mengintensifkan kerjasama penanganan bencana di kawasan. Untuk dapat mengoptimalkan kerjasama dimaksud maka negara negara ASEAN sepakat membentuk Komite Penanganan Bencana (*ASEAN Committee on Disaster Management-ACDM*). Komite ini diberikan mandat untuk mengelola kerjasama penanganan bencana, termasuk mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatannya.

Kerjasama ini dianggap penting, terkait kecenderungan peningkatan jumlah bencana di kawasan ASEAN. Hal ini dipicu karena Negara anggota ASEAN terletak di kawasan rawan bencana, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan asap. Sebagai contoh pentingnya kerjasama, bencana tsunami pada tahun 2004 menunjukkan bahwa anggota ASEAN masih memiliki kelemahan dalam menangani bencana alam berskala besar. Pangalaman yang dapat di ambil dari bencana tersebut adalah regional joint emergency response tidak dapat segera diturunkan ke lapangan karena belum adanya badan di ASEAN yang melakukan koordinasi secara khusus penanganan bencana.

Sesuai dengan mandat yang diberikan, ACDM menyusun *ASEAN Regional Programme on Disaster Management (ARPD)*, yaitu Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana. ARPD antara lain memuat kerangka kerjasama penanganan bencana antar negara ASEAN dan juga dengan mitra dialog serta organisasi internasional untuk periode 2004 – 2011.

Rangkaian program terpadu ARPD, mencakup lima komponen inti yaitu :

- (i) Pembentukan Kerangka Penanganan Bencana regional ASEAN
- (ii) Peningkatan Kapasitas;
- (iii) Pertukaran Informasi dan Sumber Daya

- (iv) Peningkatan Kolaborasi dan Penguatan Kemitraan; serta
- (v) Peningkatan Pengetahuan, kesadaran dan Advokasi Publik

Kejadian tsunami di Indonesia telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Masalah penanganan bencana, tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat sektoral tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga regional, bahkan melalui kerjasama internasional jika diperlukan.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN Pasca Gempa Bumi dan Tsunami (KTT Tsunami) di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami ini antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yaitu Deklarasi tentang Aksi untuk Memperkuat Bantuan Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pencegahan atas Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami”.

Selain hal di atas, ada beberapa butir penting lain dari Deklarasi Jakarta yang terkait dengan program ASEAN adalah (<http://www.aseansec.org/17066.htm>):

- a. Pemanfaatan aset sipil dan militer dalam operasi bantuan bencana;
- b. Pembentukan Pusat Bantuan Kemanusiaan (ASEAN Humanitarian Assistance Centre/ AHA Centre); dan
- c. Pembentukan Jaringan Pemakaian Bersama Informasi dan Komunikasi ASEAN untuk Bencana

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT Tsunami di Jakarta, pada bulan Juni 2005, ASEAN berhasil menyelesaikan Persetujuan Penanganan Bencana dan Tanggap Darurat (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response/AADMER). Persetujuan tersebut kemudian ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada kesempatan Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-38 di Vientiane, Laos, tanggal 26 Juli 2005.

AADMER bersifat terpadu, komprehensif dan menyeluruh karena mencakup semua aspek dan siklus penanganan bencana sebagai berikut (<http://www.aseansec.org/1759.htm>) :

- a. Identifikasi resiko bencana, penilaian dan pemantauan (*disaster risk identification, assesment and monitoring*)
- b. Pencegahan dan mitigasi (*prevention and mitigation*)
- c. Peringatan Dini (*early warning*)
- d. Kesiapsiagaan (*preparedness*)
- e. Tanggap Darurat (*emergency response*)
- f. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Persetujuan AADMER mulai berlaku sejak tanggal 24 desember 2009 setelah diratifikasi oleh sepuluh negara anggota ASEAN. AADMER adalah wilayah respons terhadap kebutuhan untuk membentuk suatu kerangka kerja manajemen bencana tingkat regional.

Sebagai tindak lanjut penanganan bencana, ASEAN menyelenggarakan pelatihan bersama penanggulangan bencana ASEAN (*ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise/ARDEX*). Kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun ini didasarkan pada kerawanan Negara-negara ASEAN terhadap berbagai bencana. Tahun 2010. Indonesia mengetuai ARDEX-10. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober hingga 20 November 2010. Kegiatan pelatihan bersama ASEAN ini mengusung tema *Partnership for Better Response* atau kerjasama untuk tanggap bencana yang lebih baik. ARDEX-10 diikuti 1200 peserta dari Negara ASEAN, PMI Internasional, PBB bidang bencana alam (UNDAC) serta BNPB Daerah se-Indonesia.

Untuk mempercepat pelaksanaan dari *ASEAN Agreement on Mitigation of Disaster and Rapid Response*, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati pembentukan *Stanby Force* untuk penanggulangan bencana. Dalam hal ini masing-masing anggota ASEAN diharapkan membentuk *Stanby Force*, sehingga apabila terjadi bencana yang besar di Negara anggota, satuan-satuan stanby force ini bersama-sama segera *dideploy*, dikerahkan ke daerah bencana.

Tanggal 7 Desember 2010 di Vietnam, para Menteri Pertahanan ASEAN membahas kerjasama untuk mengatasi bencana alam ASEAN. Pertemuan ini merintis pembentukan Operasi Gabungan selain perang untuk membantu penanganan bencana alam di salah satu negara anggota ASEAN. Satuan reaksi cepat penanggulangan bencana

alam ini terdiri dari beberapa unsur TNI AD, AL dan AU. Pasukan ini dibentuk untuk menanggulangi atau melakukan tindakan awal saat terjadi bencana alam.

Rangkaian Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada 2011 yang diselenggarakan di Indonesia, yang salah satu fokusnya adalah operasi kemanusiaan dan penanganan bencana (*humanitarian assistance and disaster relief*/HADR). Dalam hal ini pentingnya operasi gabungan selain perang dalam penanganan bencana menjadi komitmen bersama antar Negara-negara ASEAN.

Berkaitan dengan KTT Tsunami di Jakarta, ASEAN berhasil membentuk *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster (AHA Centre)*. AHA Centre yang berpusat di Indonesia dibentuk atas dasar tujuan dan prinsip Deklarasi ASEAN yang menyatakan bahwa : “*di dalam batas kemampuannya, negara anggota wajib memberikan bantuan untuk meringankan beban Negara anggota yang tertimpa bencana*”. AHA Center ini semacam pusat bantuan dalam rangka penanggulangan bencana. Bantuan-bantuan internasional yang diberikan akan dikoordinasikan oleh AHA Centre dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah ASEAN. Dalam hal ini untuk setiap bencana apa saja terkait gempa bumi, tsunami dan longsor serta kebakaran hutan dapat langsung diketahui dan diberitahukan ke negara-negara lain sehingga dapat secara bersama saling membantu.

Keberadaan AHA Centre dapat memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN. AHA centre diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan informasi dalam penanganan bencana di kawasan ASEAN. AHA centre juga diharapkan bisa memberi informasi yang tepat, cepat dan akurat bagi negara-negara ASEAN yang dilanda bencana serta bisa memperkuat kelembagaan penanganan bencana. Sementara itu, fungsi AHA centre dapat diklasifikasikan ke dalam lima bagian yakni (<http://www.aseansec.org/17579.htm>) :

1. sebagai pusat informasi bencana ASEAN.
2. sebagai pusat mobilisasi bantuan kepada negara ASEAN jika dibutuhkan, termasuk aset, peralatan, material, dana dan sumber daya manusia.
3. sebagai pusat koordinasi operasi antara lain memfasilitasi tanggap darurat bersama.
4. sebagai pusat koordinasi administrasi yang memfasilitasi proses dari transit personil, peralatan, material dan fasilitas lainnya dalam kaitan dengan pemberian bantuan.

5. sebagai pusat koordinasi pengetahuan dan penelitian kebencanaan di ASEAN, memfasilitasi kerjasama teknis dan penelitian di bidang kebencanaan.

Terkait mengenai penanggulangan bencana, Indonesia dianggap memiliki banyak pengalaman dalam mengatasi bencana. AHA Center merupakan salah satu komponen penting dalam kerjasama ASEAN terutama di dalam penanganan penanggulangan bencana di tingkat regional.

MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015

Konsep Komunitas

Terminologi komunitas merujuk pada pengertian nilai-nilai bersama, norma-norma dan simbol-simbol yang memberi identitas dan perasaan kekitaan (*we feeling*). Secara sederhana, istilah pembentukan komunitas dapat diartikan sebagai “pembangunan perasaan kekitaan”. Komunitas ASEAN dapat dijabarkan berdasarkan rumusan *community building*, dimana kita percaya bahwa komunitas adalah suatu hal mengenai orang-orang (*people*), dan pembangunan komunitas merupakan proses pembentukan suatu kondisi pemikiran (*state of mind*)

Keterikatan yang diwujudkan bukannya diantara badan atau institusi, perjanjian atau prosedur, tetapi suatu komitmen atau, perasaan saling menjaga dan saling berbagi, perasaan saling berpartisipasi dan berbagi kepemilikan, perasaan saling memiliki dan keterikatan, atau dengan kata lain perasaan sebagai satu komunitas. Antara konsep *open society* dan *community building* saling berkaitan satu sama lain, dalam arti komunitas regional hanya bisa dibangun di atas landasan *open societies*. (*Report of The First ASEAN People Assembly*, 2000 : 69-72)

Sebuah komunitas bukan hanya ditentukan oleh kedekatan wilayah tapi juga relasional. Dimensi relasional menjadi factor yang sangat esensial. Komunitas yang sesungguhnya terjadi jika para anggota komunitas saling bertemu dalam arti interaksi secara tatap muka/langsung. Komunitas juga bisa terjadi meski para anggotanya tidak saling berinteraksi langsung/tatap mata, namun mereka memiliki dalam pikirannya suatu citra mental mengenai kedekatan diantara mereka.

Berkaitan dengan hal di atas, jika ada *sense of community*, akan ada pula kebebasan dan keamanan. Komunitas akan hidup dengan sendirinya, apabila rakyat menjadi cukup bebas untuk berbagi dan cukup aman untuk bergaul atau menyatu.. Inilah yang disebut sebagai semangat komunitas (*the spirit of community*) (Edge Live Magazine,2005)

Sense of Community menurut McMillan dan Chavis adalah

Suatu perasaan bahwa para anggotanya mempunyai rasa memiliki, suatu perasaan dimana para anggota peduli satu sama lain dan pada kelompoknya, dan berbagi kepercayaan bahwa kebutuhan para anggotanya dapat dipenuhi melalui komitmen mereka untuk menjadi bersama (McMillan and Chavis, 1986 : 6-23)

Jika diambil benang merahnya, maka paling tidak ada tiga kualitas hubungan yang saling berhubungan di dalam kehidupan komunal (Bhakti, 2008:8):

- *Tolerance – saling menghormati*
- *Rciprocity - saling membantu*
- *Trust - saling percaya*

Langkah Menuju Komunitas ASEAN

Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang memcita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli.

Tekad untuk membentuk Komunitas ASEAN ini kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai , stabil dan sejahtera pada tahun 2020.

Pada KTT ke -12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007, komitmen untuk mewujudkan Comunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*”. Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah

untuk mempererat integrasi ASEAN menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.

Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan solidaritas, kohesifitas dan efektivitas kerjasamanya. Kerjasama ASEAN tidak lagi hanya terfokus pada kerjasama ekonomi namun juga harus didukung oleh kerjasama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Untuk menjaga keseimbangan itu, pembentukan Komunitas ASEAN berlandaskan pada 3 pilar, yaitu komunitas politik dan keamanan ASEAN (*ASEAN Political and Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

Terkait dengan masalah bencana alam yang terjadi di beberapa negara ASEAN, hal ini telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata dan memperkuat kembali kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Penanganan bencana alam di ASEAN merupakan masalah yang menjadi perhatian ASEAN Community terutama dalam pilar ketiga yaitu pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Pilar Ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “*a caring and sharing community*”, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Cakupan kerja sama bidang sosial budaya ini salah satunya meliputi bidang penanggulangan bencana alam, selain bidang kepemudaan, perempuan, perlindungan anak, pemberantasan narkoba, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan Yayasan ASEAN.

Komunitas Sosial Budaya ASEAN bersifat terbuka dan bergerak berdasarkan pendekatan kemasyarakatan (*people-centered approach*): dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Komunitas sosial budaya ASEAN mencakup kerja sama yang sangat luas dan multi-sektor serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang keberadaan ASEAN (*ASEAN awareness*). Guna mewujudkan Komunitas ASEAN, warga ASEAN harus menciptakan “rasa ke-kita-an” (*we feeling*) serta menumbuhkan rasa

saling menghormati dan solidaritas yang lebih besar. Dengan demikian, masyarakat ASEAN akan lebih mengenali benang merah yang ada di dalam budaya mereka yang sangat beragam dan akan lebih mampu menghargai identitas nasional satu sama lain. Dengan “rasa ke-kita-an” tersebut, warga ASEAN akan dapat mewariskan kepada generasi selanjutnya sebuah kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, aman dan damai, bukan saja sebagai kawasan yang bebas tetapi juga mampu mengelola permasalahan atau sengketa dengan bijaksana.

Sejauh ini, langkah-langkah konkret guna memajukan pembangunan komunitas ASEAN cenderung terbatas terhadap *state level* alias level pemerintahan-negara saja. Padahal, tanpa adanya usaha untuk membangun komunitas di level masyarakat, identitas ASEAN akan semakin jauh dari masyarakat. Pemerintah dari masing-masing Negara ASEAN perlu memikirkan hal ini—apapun national interest mereka.*(ibid)*

Hanya dengan cara yang demikian ASEAN dapat melangkah maju mewujudkan visi ASEAN 2015, suatu komunitas yang peduli di mana anggota keluarga dapat membahas permasalahan bersama dan bekerjasama dengan tingkat kepercayaan yang cukup baik. Oleh karenanya Indonesia menggagas konsep “*we feeling*” atau “kekitaan” di mana anggota keluarga dapat mengingatkan saudaranya sendiri bila terjadi penyimpangan atau kesalahan tindakan, atau membantu penyelesaian masalah yang terjadi di dalam negeri, tanpa ada niatan untuk intervensi pada urusan dalam negeri masing-masing anggota (*non interference*). Dengan demikian untuk mewujudkan ASEAN Community 2015, maka harus terlebih dahulu dibangun nilai-nilai kebersamaan sesama anggota ASEAN.

Informal diplomacy merupakan salah satu langkah yang cukup efektif dalam membangun sebuah *common identity* ASEAN. Dengan adanya program-program dari Pemerintah untuk membangun sebuah komunitas ASEAN yang mengakar terhadap masyarakat—*free movement of people* dsb, maka keberadaan ASEAN sebagai sebuah Organisasi Regional yang integratif akan semakin solid di masa mendatang.*(ibid.)*

Piagam ASEAN mengharuskan dan mendorong lebih keras keterlibatan seluruh masyarakat ASEAN dalam pembangunan komunitas itu sehingga diharapkan bisa memberikan dorongan dan pengaruh yang efektif kepada pemerintah di negara masing-masing. Partisipasi seluruh warga ASEAN, karenanya, merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan. Persoalannya tinggal bagaimana menumbuhkan kemauan kita semua untuk benar-benar menjadi bagian dari jalan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (*Kompas*, 26-2-2009). Selain itu, negara-negara ASEAN harus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama regional yang merupakan pilihan rasional untuk menyelesaikan berbagai persoalan politik dan keamanan kawasan. (Bandoro, 2009).

BENCANA ALAM DAN MOMENTUM PEMBANGUNAN KOMUNITAS ASEAN

Tragedi tsunami di Aceh tahun 2004 memberikan catatan bahwa ASEAN sebagai salah satu komunitas regional ternyata belum sepenuhnya siap dalam menangani bencana alam dalam skala besar. Pada saat yang sama bencana tsunami juga menyadarkan tentang adanya rasa memiliki ikatan persaudaraan yang kuat dari masyarakat negara-negara ASEAN. Juga adanya kepemilikan aset yang memadai untuk membantu negara tetangganya yang terkena musibah.

Fenomena bencana di ASEAN telah mendorong peningkatan kerjasama antar anggota. Pasca bencana, negara-negara ASEAN juga bertemu dalam pertemuan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan bencana. Mereka berkomitmen untuk bertindak tepat dan cepat manakala negara-negara ASEAN mengalami musibah bencana alam. Komunitas ASEAN sudah memiliki perangkat untuk mengukuhkan kerjasama dan kebersamaannya dalam menangani bencana alam, hanya saja perlu mengefektifkan penerapannya di lapangan. ASEAN sudah memiliki *The ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* serta *The ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance*, yang pelaksanaannya juga bisa mencakup kerjasama *ASEAN+3*, *East Asia Forum* dan *ASEAN Regional Forum*. Satuan inilah yang diharapkan dapat mengefektifkan pelaksanaan tugasnya dalam koordinasi dan koherensi diantara negara-negara ASEAN untuk membantu satu negara atau satu kawasan yang tengah mengalami bencana alam.

Menghadapi fenomena bencana alam yang terjadi, negara-negara ASEAN juga telah menumpahkan perhatian, solidaritas dan bantuan kepada para korban bencana. Tidak hanya ASEAN, bahkan warga dunia juga ikut menggalang solidaritasnya untuk menunjukkan perhatian pada korban bencana di Asean, terutama gempa bumi dan tsunami di ASEAN. Sekjen PBB mengatakan bahwa “ *it is an unprecedented disaster which requires unprecedented response*”. (<http://www.kbri.canberra.org.au/2005/0501191Menlu.htm>). Karena itu yang terlihat saat pasca terjadi bencana di Aceh adalah respon dunia yang luar biasa besarnya. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia.

Dalam wacana ASEAN Community, terjadinya bencana alam telah menunjukkan bahwa masyarakat asean memiliki rasa kepedulian dan *we feeling*. Keduanya merupakan komponen yang sangat penting untuk membangun *sense of community*. Hal ini terbukti bahwa pada saat terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh, tim SAR dan organisasi bantuan darurat dari negara-negara ASEAN merupakan salah satu yang pertama tiba di lapangan dan menyalurkan bantuan darurat kepada para korban bencana di Aceh. Bahkan negara anggota ASEAN yang terkena musibah juga menyalurkan bantuan kepada negara anggota ASEAN lainnya yang tertimpa bencana.

Pada kasus bencana gempa bumi di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah, 27 Mei 2006, respon tanggap darurat juga diberikan sangat cepat oleh masyarakat ASEAN. Dalam minggu pertama sesudah bencana, Tim *ASEAN Comittee on Disaster Management* (ACDM) dari masing-masing negara anggota ASEAN telah sampai di DIY dan Jateng. Tim Malaysia dan Singapore bahkan tiba sehari sesudah gempa (tgl 28 Mei 2006). Thailand dan Philipine tiba tanggal 29 Mei 2006. Negara-negara ASEAN lainnya menyusul hari berikutnya (Bayudono, 2009). Bantuan internasional diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Keberhasilan program bantuan asing yang datang saat bencana di DIY ini, terutama sambutan dan penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap bantuan negara-negara ASEAN disebabkan karena adanya anggapan kemiripan budaya (*Ibid.*). Hal inilah yang merupakan factor penting bagi upaya mewujudkan sebuah komunitas, karena pada dasarnya komunitas akan hidup dengan sendirinya apabila rakyat cukup bebas untuk berbagi dan cukup aman untuk bergaul atau menyatu. Pada

kasus ini penanganan bencana alam telah menumbuhkan *spirit of community* yang didorong oleh factor kemiripan *socio cultural*.

Bentuk kepedulian masyarakat ASEAN dalam menghadapi bencana juga tercermin dari intensitas kunjungan dan interaksi antar kepala negara. Pasca bencana telah terjadi peningkatan intensitas saling kunjung pada tingkat kepala negara di ASEAN. Negara ASEAN juga mampu menyelesaikan berbagai kesepakatan dalam waktu yang relatif singkat. Diplomasi kemanusiaan yang dilakukan negara-negara dalam tanggap bencana tercermin dari respon yang cepat dalam menanggapi bencana yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan para kepala pemerintahan, pertemuan para pejabat tinggi maupun dengan pengiriman misi bantuan kemanusiaan. Hanya dalam tempo 11 hari setelah terjadi bencana tsunami di Aceh, tgl 26 Desember 2004, lebih dari 27 pemimpin negara dan organisasi internasional bersidang di Jakarta dalam KTT Khusus ASEAN tanggal 6 Januari 2005. Hal ini menunjukkan semangat kerjasama yang luar biasa untuk membantu Indonesia menanggulangi bencana, baik untuk tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi serta upaya mitigasi dan peringatan dini di masa depan (paparan lisan Menlu RI, <http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2005/051191Menlu.htm>)

Bentuk kepedulian yang berupa respon cepat untuk membuat suatu perjanjian penanganan bencana juga terjadi di ASEAN, yaitu disepakatinya perjanjian AADMR. Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, mengatakan, “*AADMER adalah salah satu perjanjian yang dinegosiasikan tercepat dalam sejarah ASEAN, setelah melewati hanya empat bulan perundingan.*” Dia menambahkan, “*masuk kedalam penggodokan AADMER adalah kemajuan luar biasa untuk ASEAN sebagai upaya bersama dalam merespons bencana yang terjadi di daerah dan untuk mengurangi risiko bencana secara lebih efektif.*” Surin Pitsuwan, yang ditunjuk sebagai Koordinator Bantuan Kemanusiaan ASEAN oleh Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke14, mendorong lebih jauh mitra ASEAN untuk memperluas bantuan dan kerjasama mereka dengan pelaksanaan AADMER. Dia menambahkan bahwa “*dukungan seperti itu pasti akan menambah upaya kolektif ASEAN dalam membangun tahan bencana Komunitas ASEAN tahun 2015.*” (www.tabloiddiplomasi.org, 31 Januari 2010)

Melalui pembahasan dalam KTT, maka komitmen-komitmen tanggap bencana dari negara-negara ASEAN dinyatakan pada tingkat tertinggi dan karenanya akan lebih terjamin realisasinya. Disinilah tercermin tingginya tingkat kepedulian negara-negara ASEAN manakala negara tetangganya terkena musibah. Dalam hal ini tingginya tingkat pertemuan yang diselenggarakan ASEAN menunjukkan tingginya interaksi antar negara dalam membahas berbagai macam isu yang mereka hadapi. Peningkatan interaksi ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan *we feeling* di ASEAN. Tercatat bahwa jumlah pertemuan di dalam ASEAN bertambah dari yang hanya 300-an pada 25 tahun pertama usia ASEAN menjadi lebih dari 500 pertemuan sejak 2010 (Bhakti, 2011). Ini membutuhkan kejujuran dan perhatian di antara negara ASEAN untuk membuat semua pertemuan pada segala tingkatan bukan hanya bersifat seremonial semata, melainkan juga menjadi sesuatu yang berarti bagi rakyat di kawasan. Dalam pembentukan sebuah komunitas, adanya perasaan kekitaan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Oleh karenanya, mengingat bahwa perasaan *we feeling* di asean dipandang belum terinternalisasi (*Ibid.*, 2010), maka peningkatan interaksi masyarakat ASEAN dalam penanggulangan bencana alam menjadi momentum penting upaya menggalang solidaritas ASEAN dalam rangka mewujudkan ASEAN Community 2015.

Menanggapi uluran bantuan kemanusiaan, negara-negara ASEAN yang terkena musibah bencana menyambut baik dan menghargai uluran tangan negara-negara pemberi bantuan. Indonesia misalnya, menyadari besarnya kerusakan akibat bencana di Aceh, sejak awal menyambut baik bantuan bangsa-bangsa lain yang mengirimkan dana, barang, tenaga relawan dan profesional, hingga peralatan dan personil militer. Terbukti bahwa bantuan itu telah sangat bermanfaat, termasuk bagi upaya menjangkau wilayah-wilayah yang sempat terputus jalur transportasinya. Hal ini menjadi sangat terkait dengan wacana pembangunan komunitas, dimana masyarakat harus dilibatkan dalam menikmati hasil-hasil yang dicapai dalam kerjasama ASEAN.

Dalam kegiatan pelatihan bersama penanggulangan bencana ASEAN, ARDEX-10 yang mengusung tema Partnership for Better Response, menunjukkan bahwa diantara negara-negara ASEAN menyadari perlunya kerjasama dan kebersamaan dalam merespon bencana di ASEAN. Pelatihan ini mencerminkan adanya itikat baik untuk mendukung

mekanisme regional ASEAN dalam penganggulangan bencana. Juga sebagai diplomasi untuk melakukan respon bersama dalam tanggap darurat bencana melalui koordinasi nasional, regional dan kerjasama internasional. Jadi event ini manfaatnya sangat besar dalam membangun koordinasi dan kerjasama yang baik bagi anggota ASEAN jika sedang terjadi bencana, karena memang Asia tenggara rawan terhadap berbagai bencana.

Dalam rangka peningkatan kerjasama di bidang penanggulangan bencana ASEAN juga menyelenggarakan pertukaran informasi melalui berbagai seminar. Sebagai contoh di Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Aceh dan *Tsunami and Mitigation Research Centre* (TDMRC), Universitas Syiah Kuala, menyelenggarakan acara yang bertajuk, seminar kerjasama ASEAN dalam penanganan bencana, di Hotel Hermes, Banda Aceh, 25/3/2011. Seminar ini, dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kesadaran (*awareness*) di antara warga masyarakat mengenai kebencanaan dalam rangka menggalang dukungan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan kerangka kerjasama penanganan bencana di kawasan ASEAN.

Selain itu, seminar ini juga menyebarluaskan informasi mengenai ASCC (*ASEAN Socio-Cultural*)-blueprint sebagai landasan kerjasama di bidang sosial budaya di ASEAN demi menjaga kesinambungan antara strategi/kebijakan penanganan bencana pada tingkat nasional dan tingkat regional. Indonesia merupakan pusat kegiatan ASEAN mulai 2010 – 2015.

Keterlibatan dan peran militer dalam penanganan bencana juga merupakan hal menarik untuk dikaji. Peran militer menjadi sangat berarti dalam mengimplementasikan program penanggulangan bencana ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN dalam penggunaan aset dan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana merupakan bukti peran militer. *Workshop of the Use of ASEAN Military Assets and Capacities in Humanitarian Assistance and Disaster Relief*, 7-8 Oktober 2010 di Jakarta yang diikuti oleh delegasi Angkatan Bersenjata dari masing-masing negara anggota ASEAN, serta Deplu RI dan *ASEAN Working Group Chairman* merupakan perwujudan dari gagasan yang diajukan oleh Indonesia mengenai penggunaan aset dan kapasitas militer negara-negara Asean dalam bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana dalam pertemuan ADMM yang ketiga.

Dalam workshop tersebut membahas pembuatan prosedur standar operasi atau petunjuk operasional dalam penanggulangan bencana di dalam forum Asean. Dalam hal ini personel militer dapat berkontribusi pada operasi penanggulangan bencana di internasional maupun regional, meskipun masih ada beberapa kendala dikarenakan perbedaan birokrasi, kebijakan dan peraturan serta biaya-biaya mendesak yang harus dikeluarkan begitu pula dengan batasan-batasan lain di dalam negeri.

Seperti yang telah menjadi komitmen bersama dalam *Asean Security Community* serta konsensus dalam penggunaan militer pada penanggulangan bencana, beberapa hal perlu didiskusikan agar menghasilkan agenda untuk dapat diimplementasikan. Dengan diselesaikannya kerangka kerja dalam penggunaan aset dan kapasitas militer negara-negara Asean dalam bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana tidak hanya akan menjadikan bentuk yang lebih baik tetapi juga menstabilkan kerjasama antara negara-negara Asean serta masyarakatnya, juga memperkuat landasan di masa mendatang.

Karena itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memastikan bahwa upaya bersama ini merupakan bantuan kemanusiaan yang berkualitas, yang dikirim dengan cepat serta menggunakan pola kerja yang efektif dan terkoordinir dengan baik. Kepedulian negara-negara Asean musti dikedepankan dan seluruh partisipan akan bekerjasama untuk memastikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program kerja.

Hal yang penting untuk dicermati di sini adalah soal kehadiran pasukan militer asing yang menjadi bagian dalam misi penanggulangan bencana di ASEAN. Pembentukan *Stanby force* sebuah satuan siaga untuk penanggulangan bencana dan operasi gabungan selain perang yang dibentuk di ASEAN menunjukkan adanya partisipasi yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat ASEAN, baik kalangan sipil dan militer. Adanya koordinasi sipil dan militer dalam penanggulangan bencana merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Operasi gabungan selain perang ini penting untuk mengantisipasi kejadian seperti tsunami di Mentawai, Sumatera Barat, banjir bandang di Wasior, Papua barat dan letusan Merapi di Yogyakarta.

Terkait kehadiran pasukan asing dalam penanganan bencana, maka hal ini menjadi proses pembelajaran bersama dalam masyarakat ASEAN bahwa kehadiran militer asing ternyata tidak harus memunculkan sensitifitas yang berlebihann, karena kehadiran mereka untuk melakukan operasi kemanusiaan. Hal ini terlihat pada kehadiran pasukan negara asean dan juga negara lain saat terjadi bencana alam di Aceh yang mendapat sambutan baik dari berbagai pihak (www.atdr.tdmrc.org).

Mengalirnya bantuan asing dan pasukan militer asing berikut perlengkapan perangnya ke perairan aceh dapat diterima oleh masyarakat. Tugas Militer asing ini adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan dan membantu memulihkan kondisi pasca bencana alam melalui program human disaster relief. Bantuan dari personel asing yang secara aktif memberikan bantuan bagi korban tsunami di Aceh sedikit demi sedikit meruntuhkan prasangka ideologis. Kerjasama yang sifatnya universal terbangun dari bencana tsunami Aceh. Datangnya pasukan penjaga perdamaian dari berbagai negara akhirnya membukakan mata bahwa dunia internasional tidak lagi tersekat oleh batasan ideologis. Selain itu bencana juga membangunkan kesadaran komunitas internasional untuk mengirimkan pasukan penjaga keamanan dan memasuki wilayah kedaulatan Indonesia menuju Aceh (Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005 :48)

Saat ini Indonesia tengah membangun fasilitas pelatihan tanggap darurat bencana alam di Jawa Barat. Fasilitas tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kemampuan personilnya dalam menangani bencana. Fasilitas ini bisa digunakan bersama dalam meningkatkan kerjasama menanggulangi bencana alam. Hal ini karena Indonesia dan juga negara-negara ASEAN menyadari bahwa bencana alam secara alamiah akan tetap terjadi di wilayah ini. Hal ini seperti yang disampaikan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dalam kapasitasnya selaku Ketua ASEAN ketika membuka ASEAN-Japan Special Meeting di Sekretariat ASEAN, Jakarta, 9 April 2011 (<http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2011/04/09/6681.html>) :

“Saya menawarkan fasilitas itu bisa kita gunakan bersama dalam meningkatkan kerjasama menanggulangi bencana alam. Secara alamiah bencana alam akan terus datang, kita tidak tahu negara mana lagi yang terkena, tapi dengan sistem, kerjasama dan pengembangan teknologi yang baik kita bisa meminimalkan resiko bencana.”

Dalam kerangka ASEAN Community, maka diantara sesama anggota harus saling peduli dan berbagi satu sama lain. Manakala tetangganya terkena musibah maka menjadi tanggung jawab bersama anggota untuk saling membantu. Bencana alam dapat terjadi kapan dan dimana saja termasuk di kawasan negara Asean. Untuk itu sebagai negara yang tinggal di kawasan yang sama bertanggung jawab memberikan bantuan terhadap negara yang terkena bencana.

Sementara itu, dalam pernyataan bersama para pemimpin 10 negara Asean di Hua Hin, yang berjudul “Meningkatkan Keterhubungan, Memberdayakan Masyarakat” yang terdiri atas 57 butir, pemimpin ASEAN menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan peran *Asean Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA)* yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ASEAN dalam hal bencana dan tanggap darurat (*Asean Agreement on Disaster Relief and Emergency Response/AADMER*).

Penutup

Bencana alam telah menjadi tantangan nyata bagi semua bangsa dan negara, khususnya bagi negara-negara ASEAN dan negara-negara Pasifik yang memiliki kerawanan bencana cukup tinggi. Oleh karena itu menjadi penting bagi setiap negara untuk mengetahui kapasitasnya masing-masing dalam melakukan penanggulangan bencana. Dengan itu, negara-negara dapat mengidentifikasi jenis kerja sama di dalam maupun antar kawasan yang paling sesuai.

Dibalik musibah bencana yang terjadi di negara-negara ASEAN terdapat berkah yang diterima oleh negara-negara ASEAN, khususnya dalam kerangka membangun Komunitas ASEAN 2015. Dalam hal ini penanganan bencana di ASEAN dapat dijadikan momentum pembangunan ASEAN Community. Penanganan bencana alam merupakan perwujudan ASEAN yang lebih berorientasi kepada masyarakat (*people oriented*). Hal ini akan sangat penting dalam upaya untuk menumbuhkan semangat dan perasaan kekitaan (*we feeling*) yang merupakan prasarat terbentuknya sebuah komunitas. Selanjutnya apabila dua hal ini terwujud maka akan sangat mendukung terciptanya masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi (*caring and sharing society*). Semua ini sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan tercapainya Komunitas ASEAN 2015.

Isu bencana dan penanganannya telah menyebabkan interaksi dan komunikasi antara negara-negara menjadi lebih sering dan dekat. Problem penanganan bencana yang sebelumnya merupakan isu domestik dan nasional dalam proses perkembangannya telah berubah menjadi isu internasional. Solusi dari masalah-masalah ini telah melebihi kapasitas dari sebuah negara dan pemerintahan itu sendiri. Di bawah kondisi ini, interaksi regional terpadu yang baik memberikan kekuatan baru yang mengendalikan wilayah secara baik dan merupakan sebuah platform dimana solusi-solusi dan kerjasama pemerintahan dari topik-topik internasional dapat didiskusikan dan dicermati. Pada saat yang bersamaan, hal ini membantu pengorganisasian kerjasama regional dan rezim kerjasama menjadi berfungsi lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anonim, 2005, *Asean Selayang Pandang*, Jakarta : Dirjen Kerjasama ASEAN-DEPLU RI.
- ASEAN, *Roadmap for ASEAN Community 2009-2015*
- Antolik, Michael, 1990, *Asean and the Diplomacy of Accommodation*, New York : M.E. Sharpe Inc.
- Anggoro, Kusnanto, *Meneguhkan Kembali Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN*, 2003
- Bandoro, Bantarto, 1997, *Asean dan tantangan Satu Asia Tenggara*, Jakarta : CSIS
- _____, *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*, Jakarta, CSIS, 1996
- Luhulima, CPF, dkk., *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar-P2P-LIPI, Jakarta, 2008
- Pusat Penelitian Politik, *Politik BBM*, LIPI, 2005

B. Jurnal

- Andrea, F., "Komunitas ASEAN : Isyu dan Tantangan" *Spektrum*, vol 1, No. 3, juli 2004, FISIP Univ. Mustop beragama, Jakarta, 2004.
- Luhulima, C.P.F, 2003, "Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara", dalam jurnal *Analisis CSIS*, Jakarta: CSIS
- Mcmillan dan Chavis, 1986, "Sense of Community : A Definition and Theory", *Journal of Community Psychology*, 14(1)
- Keliat, Makmur, *CIVIC*, Vol.1 No.2 Agustus 2003
- "Isu-Isu Non Tradisional : bentuk Baru Ancaman Keamanan", *Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002/No 1

c. Laporan Penelitian

Wuryandari, Ganewati (ed.), 2003, *Menuju ASEAN Vision 2020: Tantangan dan inisiatif*, laporan penelitian, Jakarta : PPW-LIPI.
Luhulima, C.P.F., et.al, 2008, *Masyarakat Asia Tenggara menuju Komunitas ASEAN 2015*, laporan penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar - P2P-LIPI

d. Makalah Seminar/Forum Dialog :

Chalermphanupap, Termsak, "ASEAN's Preparation for ASEAN Community, Seminar Internasional : *Celebrating the 40th Anniversary of ASEAN : ASEAN Steps to ASEAN Community*, Solo, 2008
Luhulima, CPF., Menuju Pembentukan Komunitas keamanan ASEAN, makalah yang disampaikan dalam seminar sehari *Menuju Realisasi Visi ASEAN 2020*, diselenggarakan oleh Univ. Prof. Dr. Mustopo (Beragama), 14 Juli 2004
Bhakti, Ikrar Nusa, 2008, "Kajian Mengenai Komunitas ASEAN : Suatu Kerangka Analisis" *Seminar Centralitas ASEAN*, Yogyakarta, 2007
Yusuf, Ibrahim, "Membangun Komunitas Sosial Budaya ASEAN", Seminar *Menuju Realisasi Visi ASEAN 2015*, Jakarta, 14 Juli, 2004

e. Surat Kabar

Bantarto Bando, "Masa Depan ASEAN bukan Ilusi", *Seputar Indonesia*, 3
Maret 2009.
Makmur Keliat, "Pembangunan Komunitas ASEAN", *Kompas*, 1 Desember 2004

f. Internet

Pentingnya informal diplomasi dalam pembangunan komunitas
asean <http://amahlazwar.wordpress.com>
Rudolfo Saverino, CHAIRMANS-STATEMENT-OF-THE-16TH-ASEAN-SUMMIT-
TOWARDS-THE-ASEAN-COMMUNITY-FROM-VISION-TO-ACTION,
http://asean2010.vn/asean_en/news/46/2DA86A
Makmur Keliat, "Pembangunan Komunitas ASEAN", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/01/opini/1407756.htm>
"Tabloid Diplomasi", <http://www.tabloiddiplomasi.org>, 31 Januari 2010
"ASEAN Agreement on Disaster Managent and Emergency Respons",
<http://www.aseansec.org/17579.htm>
"Declaration on Action to strengthen Emergency Relief, Rehabilitation, Reconstruction and Prevention on the Aftermath of Earthquake and Tsunami Disaster, 26-12-2004", <http://www.aseansec.org/17066.htm>
"Special Asean Leaders Meeting on Aftermath of Earthquake and Tsunami, Jakarta, 6 Januari 2005, <http://www.aseansec.org/17066.htm>
"Meletakkan fondasi membangun harapan", <http://www.atdr.tdmrc.org>
"Asean telah Memiliki Instrumen Bersma untuk Tangani Bencana",
<http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/04/09/6681.html>
"Paparan Lisan Menlu RI : Refleksi tahun 2004 Proyeksi Tahun 2005", http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2005/051191_Menlu.htm

